

## LIVING QUR'AN DIKALANGAN GENERASI MUDA: STUDI KASUS KOMPPAQ (KORP MAHASISWA PENGHAFAL DAN PENKAKAJI AL-QUR'AN)

Syarah Auliya Hadzani<sup>1</sup>, Muhamad Syatiri<sup>2</sup>  
[hadzanisarahauliya@gmail.com](mailto:hadzanisarahauliya@gmail.com)<sup>1</sup>, [syatiri039@gmail.com](mailto:syatiri039@gmail.com)<sup>2</sup>  
universitas paramadina

### ABSTRAK

Para pendiri negara ini dulu telah sepakat mendirikan negara Indonesia atas dasar Pancasila, mereka meyakini negara dan agama sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Indonesia bukanlah negara agama, karena tidak menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi negara secara formal, bukan pula negara sekuler karena tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara simultan memadukan antara analisis dokumen, wawancara terhadap para tokoh dan anggota KOMPPAQ, dan social media. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dilakukan melalui analysis interactive model yang dikembangkan Miles dan Haberman (1987) yaitu melalui data collection and timing, data display, data reduction and analysis, hingga conclusion. Aksi-aksi KOMPPAQ yang menjalankan praktik-praktik Living Quran sangat jauh dari dan dilandasi pemahaman keislaman dan kebangsaan yang benar sesuai dengan moderasi islam di Indonesia, organisasi ini sangat jauh dari suatu gerakan yang menyimpang (social deviance). Selama ini tidak ada aksi-aksi KOMPPAQ yang bersifat melawan hukum atau berdampak menimbulkan korban dan kerugian milik pribadi atau fasilitas umum. Dalam perspektif teori gerak sosial, sikap KOMPPAQ lebih berfokus kepada kelompoknya tanpa adanya sikap perlawanan anti pemerintah maupun tidak mengerahkan aksi-aksi pengerahan massa untuk menuntut sesuatu. Dalam aktivitasnya atau tradisi yang mereka jalankan mengikuti tradisi NU mengikuti Masyarakat sekitar.  
**Kata Kunci:** Gerakan, Living Qur'an, KOMPPAQ

### PENDAHULUAN

Munculnya gerakan islam di kampus dipicu oleh faktor yang berbeda dalam setiap zaman. Meskipun beberapa Gerakan tersebut memiliki kesamaan dan pola-pola Gerakan maupun tujuannya. Lewat tulisan ini penulis ingin menganalisa Sejarah munculnya Gerakan islam dan perkembangannya melalui Gerakan mahasiswa yang berada di kampus. Lalu penulis berfokus pada salah satu Gerakan mahasiswa islam yaitu KOMPPAQ (Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Quran), yang mana kelompok ini merupakan Kumpulan mahasiswa Jawa Barat, Banten dan sekitarnya yang berdomisili di Jakarta terdiri dari Mahasiswa/i Universitas PTIQ-IIQ Jakarta yang sedang menuntut ilmu dan menghafal Al-Qur'an serta berupaya mengkaji kandungannya.

Manusia adalah khalifah di muka bumi untuk menjaga dan melestarikan jagad raya ini disertai suatu pedoman hidup sebagai barometer perjalanan menuju rida Sang Khaliq. Al-Qur'an sebuah kitab suci yang diyakini milyaran umat manusia sebagai sumber esensial dalam mengarungi arti sebuah kehidupan, juga merupakan i'tikad dalam menegakan agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Berjuang untuk mempertahankan kemurnian Al-Qur'an dan mengkaji kandungannya secara terus menerus merupakan kewajiban umat nabi Muhammad Saw. yaitu Islam, terutama para hafizh dan hafizhah karena sesungguhnya dengan kesadaran dan keyakinan yang tulus dan bertanggung jawab akan keberadaan Al-Qur'an di masa mendatang adalah satu-satunya alternatif yang dapat

menghantarkan manusia ke jenjang kehidupan yang aman dan damai, sentosa lahir dan bathin dalam meniti kehidupan dunia dan akhirat demi kemajuan Islam dan umatnya khususnya di Indonesia.

Para pendiri negara ini dulu telah sepakat mendirikan negara Indonesia atas dasar Pancasila, mereka meyakini negara dan agama sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Indonesia bukanlah negara agama, karena tidak menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi negara secara formal, bukan pula negara sekuler karena tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Indonesia merupakan negara kebangsaan dengan kekhasan tersendiri, dimana Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum digunakan untuk mengikat berbagai kemajemukan yang ada, tanpa mengorbankan kepentingan agama, budaya maupun negara itu sendiri. Islam dan negara menjadi kesatuan integral yang memandu dan mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara bersama, tanpa harus meletakkan Islam sebagai label negara.

Berpijak atas pemikiran tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian pandangan para tokoh gerakan sosial Islam, khususnya yang ada di Indonesia saat ini yang memiliki banyak sekali perbedaan pandangan mengenai Gerakan Islam. Ada yang menginginkan terbentuknya negara Islam, namun ada juga yang menginginkan Islam Nusantara yang memiliki paham kebangsaan NKRI, Pancasila serta UUD 1945. Untuk itu, peneliti merasa tertarik untuk menelaah salah satu organisasi sosial keagamaan yang ada di Jakarta yaitu Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Quran (KOMPPAQ) Kota Jakarta. Organisasi KOMPPAQ.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Pengertian dan Teori Gerakan Sosial**

Dalam sketsa teoritik ilmu sosial penjelasan mengenai gerakan sosial begitu beragam serta tidak dapat digeneralisir antara teori yang satu dengan yang lain, beberapa sosiolog menyebut gerakan sosial lebih dari sebagai suatu bentuk dari tindakan kolektif. Dari kepentingan yang berbeda maka pertentangan akan melahirkan dengan istilah "perjuangan kelas". Yakni dimana kelas yang didominasi atau tereksplotasi akan melakukan penentangan dan mengambil alih kebijakan. Maka dijelaskan konsep gerakan sosial diantaranya sebagai berikut: Menurut Macionis gerakan sosial adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditunjukkan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial.

Dari definisi gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Macionis tersebut, maka dapat digaris bawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni adanya aktivitas yang diorganisir dan ada tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial. Senada dengan Macionis, Spencer menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif yang ditunjukkan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru. Ciri utama dari pandangan Spencer adalah adanya upaya kolektif (bersama) dan Upaya tersebut diarahkan untuk terjadinya perubahan suatu tatanan yang lebih baik lagi dari tatanan yang ada.

Sujatmiko menyatakan bahwa gerakan sosial diartikan sebagai bentuk aksi kolektif dengan orientasi konflikual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jaringan lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. Ralph Turner dan Lewis Killian melihat gerakan sosial dalam perspektif "prilaku kolektif". Menurut keduanya, gerakan sosial merupakan sebuah bentuk khusus dari prilaku kolektif yang dibedakan terhadap prilaku "organisasional" dan "institusional".

Gerakan sosial tidaklah perlu ataupun memiliki tipikal dengan gerakan yang berbasis sejumlah organisasi, meskipun gerakan ini membawa juga kerja-kerja gerakan dan secara teratur mencoba untuk melakukan kontrol dan berbicara atas nama gerakan. Gerakan sosial menurut Sidney Tarrow adalah sebagai: “kelompok yang memiliki kesadaran diri untuk bertindak, perhatian untuk mengungkap apa yang dilihatnya sebagai klaim-klaim dengan menentang kelompok elit, penguasa, atau kelompok lain”.

Menurut Tarrow ada elemen-elemen yang menjadi bagian penting keberadaan gerakan sosial yaitu elemen gerakan sosial dalam ranah perlawanan adalah tentang kolektif, tujuan umum, solidaritas sosial, intraksi yang berkelanjutan dengan elit, lawan dan otoritas. Jadi gerakan sosial yang melakukan politik perlawanan atau persetujuan yang didasarkan pada jaringan sosial dan pembingkai tindakan kolektif dan selalu mengembangkan kapasitas untuk mempertahankan tentang yang berkelanjutan terhadap lawan kuat.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Charles Tilly, mendefinisikan gerakan sosial sebagai rangkaian aksi perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok yang dirugikan terhadap pemegang kekuasaan melalui berbagai ragam protes publik, termasuk dalam tindakan-tindakan di luar jalur partisipasi politik formal yang di atur dalam hukum dan perundangan, untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen, serta mewakili jumlah yang signifikan.

Secara umum Tilly berargumentasi bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang terorganisir (organised), berkelanjutan (sustained), menolak self-conscious (self-conscious challenge) dan di dalamnya terdapat kesamaan identitas (shared identity) di antara mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Tilly menekankan pada dinamika kondisi keseluruhan yang menentukan keresahan bahkan kerusuhan sosial dan karakteristik-karakteristik yang ada padanya, ketimbang gerakan pada gerakan sosial dimana terdapat aktor-aktor yang terorganisir secara spesifik. Perspektif teoritis Tilly, bisa dilihat dalam definisinya mengenai gerakan sosial sebagai sebuah “rangkai intraksi keberlanjutan (sustained series of interactions)” antara otoritas dengan para penentangannya yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi tertentu.

Memperhatikan beberapa definisi tentang gerakan sosial di atas, jelas sekali memberikan titik tekan terhadap pengertian gerakan sosial pada beberapa hal yakni:

- a. Gagasan ideal ketimbang pengejaran kepentingan material.
- b. Senantiasa berkaitan dengan perubahan menuju suatu arah yang dianggap ideal oleh para penggerakannya.
- c. Menekankan pada segi kolektif dari suatu gerakan sosial, sedangkan diantara mereka ada pula yang menambahkan segi kesengajaan, organisasi dan kesinambungan.

Beberapa ahli memosisikan gerakan sosial sebagai suatu gerakan perubahan yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan ideal. Munculnya gerakan sosial tersebut karena ada suatu kesenjangan yang dilakukan oleh kelompok dominan atau berkuasa. Gerakan sosial merupakan entitas dinamis terkadang bersifat non formal. Di sisi lain ada juga yang memberi perhatian pada aksi dan upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama dalam rangkai perubahan, gerakan dimana dilakukan oleh kelompok di luar lingkungan lembaga-lembaga yang mapan.

Menurut Tilly salah satu unsur gerakan sosial adalah kondisi hubungan pertentangan (contention relatif). Konsep ini memberikan penegasan bahwa aksi kolektif adalah aksi yang dilakukan sekelompok masyarakat secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai gerakan sosial yang melakukan reportar di antaranya:

1. Gerakan sosial merupakan gerakan terorganisir.

2. Gerakan sosial senantiasa memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau mempertahankan suatu kondisi.
3. Gerakan sosial melakukan tindakan yang terorganisasi.
4. Gerakan sosial melakukan tindakan menentang secara berkelanjutan.
5. Gerakan sosial melakukan klaim secara terbuka.
6. Gerakan sosial melakukan aksi perlawanan secara terus-menerus dan berulang.
7. Gerakan sosial adalah gerakan yang memelihara politik perlawanan tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung.
8. Gerakan sosial berkembang dan bertahan karena mampu memanfaatkan peluang politik yang ada.
9. Gerakan sosial memiliki solidaritas dan identitas gerakan.

## **B. Pengertian Gerakan Islam**

Gerakan sosial Islam hadir untuk merespons berbagai kondisi sosial politik dan ekonomi yang dihadapi umat Islam. Kemunculan gerakan sosial Islam (disingkat GSI) merupakan manifestasi dari panggilan untuk terlibat secara aktif dalam proyek kemanusiaan untuk mentransformasi kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih berkualitas, lebih beradab dan merefleksikan nilai-nilai profetik Islam.

Sejarah panjang gerakan sosial di berbagai belahan dunia, umum hadir untuk menyikapi keterpurukan umat Islam, misalnya kemunculan Ikhwanul Muslimin di Mesir merupakan respons atas runtuhnya khilafah Turki Usmani, kemunculan Hizbut Tahrir di Palestina juga dipandang sebagai respons terhadap ekspansi Zionis dan Barat yang begitu kuat ke jantung umat Islam, hal yang sama juga dialami oleh gerakan sosial di Pakistan, hadir untuk merespons peluang politik yang tersedia pasca berpisah dari India.

GSI juga muncul di belahan benua Asia dan Afrika dalam rangkaian transmisi ideologi revivalisme Islam, modernisasi Islam yang kemudian diikuti dengan menguatnya ideologi Wahabbisme dan Salafisme. GSI bertujuan untuk mereformasi sistem sosial dan sistem politik agar sesuai dengan nilai-nilai etik Islam. GSI tersebut dibersinergi dengan meningkatnya jumlah kaum terpelajar di kalangan muslim, khususnya di negara-negara yang memiliki umat Islam mayoritas seperti halnya Indonesia.

Munculnya GSI awal abad ke-20 di Nusantara sebagai konsekuensi logis meningkatnya jumlah kaum terpelajar, munculnya Sarekat Dagang Islam (SDI) 1905 sebagai embrio GSI yang disusul dengan berdirinya Sarekat Islam tahun 1912 (SI dianggap sebagai kelanjutan dari SDI) dan Muhammadiyah 1912 merupakan respons atas kondisi internal umat Islam yang nyaris sempurna kolaps serta penetrasi pihak luar melalui kolonialisme dan imperialisme Barat. Untuk visi yang sama, lebih dari satu dekade kemudian, berdiri Persatuan Islam (Persis) pada 1923 di Bandung dan Nahdatul Ulama (NU) pada 1926 di Surabaya juga dideklarasikan.

Kemunculan GSI dianggap sebagai kebangkitan kelompok sarungan yang mengadaptasikan konsep-konsep Islam yang bersifat eksklusif dengan pemikiran modern yang bersifat rasional dan fungsional. Melalui kemunculan GSI tersebut dapat dipahami bahwa gerakan sosial mengalami eskalasi dalam situasi politik yang tidak stabil (terjadi distorsi identitas, krisis sosial, krisis politik) termasuk di dalamnya berkembangnya konflik dalam suatu negara sebagai akibat dari pemberontakan dan gerakan teror yang hadir dalam situasi politik yang berubah.

Kekuatan eksternal suatu negara juga ikut menentukan arah gerakan terbentuk, baik faktor ideologi, jaringan sumber dana ataupun kontribusi pihak luar terhadap kekacauan dalam suatu negara seperti pada kasus krisis Indonesia 1998, krisis di Mesir tahun 2010 dan 2013, krisis di berbagai wilayah lainnya memungkinkan munculnya gerakan sosial yang memanfaatkan peluang politik yang tersedia untuk mengorganisir diri dan proses

pembentukan ulang identitas politik. Di Indonesia pasca 1998 misalnya, muncul sejumlah GSI yang memanfaatkan peluang politik yang dibuka oleh kapitalisme Barat.

### **C. Gerakan Islam Modern Kontemporer**

GSI muncul atas dasar kalkulasi dan asumsi rasional mengenai peta politik global, kebijakan ekonomi politik negara-negara maju terhadap dunia Islam yang tidak adil, diskriminasi serta kolonialisme dan imperialisme dalam berbagai bentuknya, termasuk imperialisme akademik intelektual menjadi penyebab utama bangkitnya GSI di sejumlah negara. Gerakan yang berhaluan politik seringkali hadir sebagai reaksi atas penindasan terhadap umat Islam yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan asing yang disertai dengan penindasan identitas sosialnya.

Secara universal, GSI merupakan rangkaian protes sosial atas perasaan teringkari umat Islam terhadap eksistensi hidup mereka serta teka teki bagaimana perasaan itu diartikulasikan dalam kehidupan sosial politik menjadi pilihan bebas yang sebagian dimanifestasi dengan mengorganisir diri untuk melakukan transformasi sosial dan emansipasi masyarakat. Dengan menggunakan perspektif teori gerakan sosial kontemporer, kemunculan GSI sebagai bentuk pendekatan jalan tengah antara realitas sosial umat Islam dengan harapan-harapan ideal mengenai bentuk masyarakat yang dikehendaki.

Kemunculan GSI di berbagai negara dapat dipandang dalam pendekatan struktural dengan fokus pada negara dan keterlibatan pihak asing yang membangkitkan tindakan kolektif dan pilihan-pilihan rasional yang dipandang efektif untuk mempertahankan identitas sosialnya. Kemunculan Ikhwanul Muslim di Mesir pada tahun 1928, Gerakan Jihad Islam di Palestina tahun 1960, Hizbut Tahrir di Palestina tahun 1952, Jamati Islami Pakistan tahun 1941, Masyumi di Indonesia tahun 1945, PAS Malaysia tahun 1951, FIS (Barisan Penyelamat Islam) Aljazair 1989, Harakat a-Muqawima al-Islamiyyah (HAMAS) Palestina 1988, Hizbulloh di Lebanon 1982, Partai Rafah di Turki 1981, dan berbagai gerakan sosial Islam lainnya di sejumlah negara secara umum merupakan manifestasi dari perubahan sosial dan struktur peluang politik yang berimplikasi pada perubahan struktur politik internasional.

Struktur peluang politik bisa diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari dunia internasional. Sebagai contoh sederhana yang menegaskan masalah ini adalah tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan sosial Islam Indonesia pasca Orde Baru yang memanfaatkan struktur peluang politik dibuka dan diinisiasi oleh kaum kapitalis, meski dalam kenyataannya, kaum islamis mempersoalkan kapitalisme dan varian-varianya. Eskalasi GSI, selain struktur peluang politik, juga didukung oleh struktur mobilisasi yang dipergunakan, selain mobilisasi sumber daya, mobilisasi media gerakan, dan mobilisasi jaringan efektif mendorong eskalasi gerakan. Melalui jaringan ini, gerakan akan mengalami peningkatan kapasitas dan kemampuan untuk menggerakkan gerakannya.

Mobilisasi tidak berlangsung tanpa disertai dengan penguatan identitas gerakan dan akar sosial yang menjadi dasar kemunculan dan perkembangan GSI. Dalam konteks kemunculan Ikhwanul Muslimin di Mesir misalnya, variabel eksternal dan kondisi umat Islam menjadi akar sosial kemunculannya, runtuhnya khilafah Islam di Turki (Turki Usmani) dianggap sebagai salah satu faktor pendorong pelebagaan gerakan dengan memobilisasi sumber daya secara efektif.

Secara umum Ikhwan merupakan organisasi GSI modern yang dipimpin oleh kaum terpelajar sebagaimana halnya dengan kemunculan HAMAS di Palestina yang secara umum merupakan fenomena perkotaan, bahkan gerakan ini dipimpin oleh kader-kader yang berpendidikan Barat dengan keterlibatan ulama yang sedikit. Lanskap GSI menunjukkan adanya korelasi antara meningkatnya jumlah intelektual muslim terpelajar

dengan kebangkitan gerakan sosial di dunia Islam.

Revivalisme Islam merupakan suatu keniscaya dalam struktur GSI, bahkan secara spesifik Oliver Roy menyebut latar belakang pendidikan para aktor gerakan revivalisme Islam, utamanya mereka yang mendorong berkembangnya ideologi islamisme umumnya berasal dari ilmu-ilmu eksakta (sarjana teknik). Apa yang dimaksud oleh Roy mengenai latar belakang para aktor GSI dapat dipersoalkan, mengingat ditemukan juga sarjana sosial yang terlibat dalam organisasi pergerakan revivalisme Islam seperti pada kasus National Islamic Front (NIF) di Sudan yang dipimpin oleh Dr. Hassan Abdullah at-Turabi, lulusan Sorbone University.

Visi besar GSI berkisar pada dua domain utama yakni islamisasi negara dan islamisasi masyarakat. Ide mengenai islamic state atau khilafah islamiyah merupakan pilihan gerakan pada beberapa kasus di sejumlah negara seperti kasus FIS Aljazair yang menentang keras Barat atau pada kasus Welfare Party (Partai Kesejahteraan) yang dipimpin oleh Prof. Necmetin Erbakan di Turki yang kini bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Turki yang merupakan partai berkuasa.

Secara umum, GSI mengembangkan gagasan mengenai islamisasi pasif ketika berhadapan dengan kooptasi politik dan kooptasi modal sembari membangun hubungan yang mesra dengan rezim dengan target-target politik jangka panjang. Pola hubungan yang bersifat simbiosis mutualism yang dikembangkan oleh sejumlah GSI di berbagai negara memiliki agenda pentahapan gerakan yakni melakukan islamisasi masyarakat melalui pendidikan dan pembentukan komunitas-komunitas religius yang dikondisikan menjadi komunitas yang taat terhadap prinsip-prinsip hidup islami. Untuk beberapa kasus, strategi gerakan semacam itu, juga pernah dipergunakan oleh GSI yang eksis di Nusantara seperti yang dilakukan Muhammadiyah pada akhir 1920-an dan awal 1930-an dengan menerima subsidi pemerintah atas sekolah-sekolah yang dikelolanya.

#### **D. Konsep Islam Moderat/Wasathiyah**

Kata moderat berasal dari bahasa Araba, wasathiyah, yang saat ini sudah bukan kata asing lagi. Studi tentang frasa ini sudah sejak kurang lebih satu abad. Hal ini menunjukkan bahwa wasathiyah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat saat ini. Jika dilihat secara bahasa, wasathiyah sendiri berasal dari kata wasath yang berarti moderat atau medium. Makna kata wasath di dalam kamus Lisanul Arab bermakna pertengahan atau di antara kedua ujung. Arti lainnya yakni al-wasthu dengan harakat sin sukun yang berartikan nama suatu tempat ataupun zaman. Terdapat pula arti lain yang menunjukkan bahwa ia adalah sifat *awsathis-syai'* atau pertengahan yakni yang paling utama.

Di dalam kamus Munjid, wasathiyah berasal dari kata wasatha-yasithuwasthan-wasithathan, yang bermakna al-makan aw al-qaum atau diartikan duduk di antara keduanya, wasatha al-qoum atau pertengahan antara kebenaran dan keadilan. Wasutha-yasithu atau diartikan suatau yang mulia, dan tawassath al-qaum bermakna berdiri sebagai penengah dan pembenar. Sedangkan wasath dalam kamus Wasith bermakna penggerak dari segala sesuatu atau yang paling adil. Juga bermakna wasathahum aw wasith yaitu tempat yang paling tengah atau pertengahan di antara dua kerumunan.

Kata wasath juga memiliki istilah lainnya yakni al-qisth, tawazun, wal i'tidal. Al-qisth bermakna adil, tawazun berarti keseimbangan, dan i'tidal beartikan mediasi antara dua hal ataupun banyak hal. Singkatnya, wasth berarti suatu keadilan dalam jalan kebenaran, tanpa ada condong kebagian atas ataupun bawah. Seperti yang dipikiran para pakar teoritis yang berbeda-beda pendapat, maka makna wasathiyah pun berbeda. Namun, perbedaan ini sangat menonjol khususnya pada para pemikir Muslim dan Barat, di antaranya oleh Yusuf al-Qardhawi berasaskan al-Qur'an yakni di dalam firman Allah:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”

Menurut Ibn Jarir al-Thabari, al-wasth bermakna di antara kedua tepi atau suatu keadilan. Adapun wasth adalah sebab suatu pertengahan dalam agama tanpa ada berlebihan seperti Nasrani dalam peribadatannya, tanpa ada pengurangan seperti Yahudi yang mengganti kitab Allah dan memalingkannya, akan tetapi menjadi suatu pertengahan dan adil di antara keduanya. Adapun penekanan di sini bahwa Islam menjadi penengah baik dari segi aqidah, ibadah ataupun muamalah di antara manusia, dan hukum-hukum dalam suatu kehidupan masyarakat.

Dari pandangan ini menunjukkan bahwa wasathiyah sejatinya telah dimulai sejak munculnya Islam itu sendiri dan bukan suatu ide baru di era kontemporer saat ini. Adapun wasthiyha menurut al-Ashafahani diartikan sebagai antara dua ujung ataupun letak suatu keadilan tanpa ada kelebihan dan kekurangan. Adapun wasth menurut Ibn ‘Asyur di dalam al-Tahrir wa al-Tanwir, mengartikan secara bahasa sebagai suatu sifat pertengahan di antara dua bentuk. Sedangkan secara istilah yakni nilai-nilai Islam berdasar atas akal yang sehat tanpa berlebihan.

Merujuk pada QS. al-Baqarah [2]: 143 di atas, al-Jazairi memahami redaksi ummatan wasathan dengan memberi makna umat pilihan dan suatu keadilan dengan penunjuk ke jalan yang lurus. Dari penjelasan di atas, disebutkan bahwa wasathiyah merupakan sifat yang terpuji tanpa ada kecondongan ke-sifat ushuli serta berlebihan pada Batasan-batasan Allah. Adapun wasathiyah sendiri adalah sifat yang diberikan Allah khusus umat muslim, yaitu ketika suatu umat istiqamah dalam menjalankan perintah Allah.

Sifat ini juga menjadi standar suatu moderasi, baik dalam hal muamalah sesama manusia di dunia ataupun di dalam agamanya di akhirat. Maka wasathiyah menjadi suatu ciri khas bagi Muslim tanpa mengikuti agama lainnya, yakni bersikap moderat ketika berdakwah dan bersifat toleransi, enentang suatu hal yang berlebihan, serta bersifat radikal ataupun fundamental. Radikalisme dalam arti memahami Islam dengan nafsu dan logika murni, karena cenderung tidak ilmiah. Moderasi Islam berartikan penolakan ekstrimisme dalam bentuk tirani dan kepalsuan, dan inilah sifat manusia yang benar dan sehat yakni belum tercampur unsur-unsur negatif dalam suatu pemahaman.

#### **E. Moderasi Beragama di Indonesia**

Pembahasan moderat di Islam Nusantara, berdasarkan kesepakatan ulama Ushul Fiqh bahwa Syariat Islam adalah langsung dari perintah Allah yang bertujuan sebagai maslahat dan pencegahan suatu bahaya bagi hambanya dengan jalan maqasid syariah. Maka, tidak salah bahwa para mujtahidin terdahulu banyak memfatwakan pembahasan-pembahasan dengan mencari ayat-ayat syariah dan hukum-hukum yang berlaku darinya, di mana dari sana terbentuklah suatu hukum dari perkara yang dibahas.

Dari suatu bahasan akan terbentuk dari hasil kaidah syariah, yang di dalamnya terdapat maksud yang harus dilaksanakan, yakni penekanan suatu manfaat dalam suatu ilmu dan akhirat. Al-Maslahat adalah suatu kebaikan dan manfaatnya akan terbentuk dalam pelaksanaan kulliyat-al-khams atau lima prinsip dasar, yakni hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-nasl, hifdzu al-aql, dan hifdzu al-mal. Adapun Islam Nusantara sendiri meyakini konsep lima prinsip dasar tersebut yang tercermin dalam ideologi Indonesia.

Dalam konteks pembahasan ini, Allah telah menurunkan firman-firman-Nya yang menyatakan bahwa Islam memiliki konsep moderasi dalam segala hal, baik keyakinan, peribadatan, sikap etika, perilaku, serta dalam segi hukum sosial tanpa ada ekstrimisasi.

Ini tertuang dalam penjelasan QS. Al-Maidah [5]: 87;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Dalam Islam Nusantara, ia memiliki beberapa metodologi dalam menyelidiki konsep moderasinya, yaitu dengan menggunakan istilah “menjaga dan mengambil” maqasid syariah. Cara ini digunakan untuk mencapai peran agama sebagai budaya di Indonesia. Oleh karena itu, Islam Nusantara cukup identik dengan adat istiadat atau tradisi sebagai aturan normatif umum tentang metode dalam konsep moderat.

Di antara subjeknya adalah imamat yang dibentuk untuk menyukseskan nubuwat yang imamat dalam penjagaan agama dan kebijakan dunia, diperbaiki dengan adat sebagaimana diperbaiki oleh teks, kerusakan tidak dapat hilang dengan kerusakan, jika menyempit suatu perkara akan melebar dan jika melebar akan menyempit, untuk mencegah kejahatan yang diutamakan dari mencari keselamatan, untuk turun ke realitas yang lebih tinggi pada sesuatu yang ideal, di rumah selama mereka berada di rumah mereka, lingkungan mereka selama mereka berada di lingkungan mereka. Dengan demikian, Islam adalah agama yang menengah yang melarang tindakan ekstremis, baik di bidang iman, sikap, perilaku, perlakuan manusia atau undang-undang.

Moderasi Islam menolak umatnya baik secara keseluruhan ataupun individual dan menjaga dari hal yang berbentuk ekstrim, menyerukan makna keadilan, moderasi, integritas, keseimbangan dan rasa hormat terhadap yang lain yang dianjurkan oleh Islam, serta menyerukan penolakan gambar kekerasan, kekejaman, kemarahan, balas dendam dan terorisme. Jika pendekatan budaya terhadap syariah yang membuat Islam di Nusantara lebih moderat bukanlah ajaran Islam Nusantara khususnya, tetapi telah menjadi ciri umum advokasi Islam di berbagai daerah di dunia. Karena sikap Islam terhadap tradisi dan budaya lokal, hanya dijelaskan dalam kajian ilmu pengetahuan Ushul Fiqh dengan jalan yang jelas.

Moderasi bagi pemikir Muslim Hamed Fahmy Zarkashi, merupakan sebuah keseimbangan antara teks dan konteks. Moderasi tidak boleh cenderung pada konteks situasi atau lingkungan politik dan melampaui teks. Kewenangan adat atau masalah lebih dipilih, dan lebih cenderung mengkontekstualisasikan situasi tanpa teks.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara simultan memadukan antara analisis dokumen, wawancara terhadap para tokoh dan anggota KOMPPAQ, social media, serta pengamatan terhadap unsur-unsur yang dianggap mendukung dan memberikan data terkait penelitian. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, beberapa data yang diperoleh diverifikasi melalui sumber-sumber lain. Sedangkan analisis data dilakukan melalui analysis interactive model yang dikembangkan Miles dan Haberman (1987) yaitu melalui data collection and timing, data display, data reduction and analysis, hingga conclusion.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum ada dua bentuk gerakan sosial Islam di Indonesia. Pertama, adalah gerakan yang bersifat moderat dalam arti secara politik tidak menawarkan alternatif radikal terhadap kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung. Kedua, adalah mereka yang secara radikal menawarkan alternatif landasan dan kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung, serta cenderung konfrontatif terhadap lawan dan kelompok moderat.

Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok radikal atau fundamentalis.

Dalam pandangan teori sosial klasik-sosiologi, psikologi maupun politik, gerakan radikal sosial yang berbau agama maupun tidak, akan dipandang sebagai suatu gerakan yang menyimpang (*defiance*), hal itu dikarenakan sikap, pandangan maupun perilaku sosialnya berbeda dengan *mainstream* masyarakat. Pandangan yang demikian ini dipengaruhi oleh teori struktural-fungsional. Teori ini beranggapan pada suatu pemahaman bahwa sebuah sistem masyarakat adalah sebagai suatu kesatuan. Elemen-elemen yang ada dalam sistem tersebut saling mendukung dan saling memperkuat untuk melanggengkan sistem sosial masyarakat. Gerakan radikalisme dari sudut ini dipandang sebagai penyimpangan terhadap keutuhan suatu sistem sosial.

Berdasarkan teori tersebut, maka aksi-aksi KOMPPAQ yang menjalankan praktik-praktik *Living Quran* sangat jauh dari dan dilandasai pemahaman keislaman dan kebangsaan yang benar sesuai dengan moderasi islam di Indonesia, organisasi ini sangat jauh dari suatu gerakan yang menyimpang (*social deviance*). Selama ini tidak ada aksi-aksi KOMPPAQ yang bersifat melawan hukum atau berdampak menimbulkan korban dan kerugian milik pribadi atau fasilitas umum, sejauh ini aspirasi dari kelompok gerakan sosial KOMPPAQ bersama komponen masyarakat lainnya mampu memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat.

Keberadaan KOMPPAQ sebagai bagian dari organisasi diluar kampus bisa menjadi aspirasi dan ladang pengalaman bagi mahasiswa untuk terus menjalankan aktivitas positif mereka.

## **KESIMPULAN**

Kehadiran KOMPPAQ menurut para pendirinya adalah untuk menjaga hafalan al-quran sekaligus mengkaji literatur-literatur islam, agar tercipta mahasiswa yang agamis dan untuk menjaga aqidah umat Islam dari upaya-upaya pihak luar yang ingin melakukan pemurtadan, serta meluruskan kesesatan yang dilakukan oleh kelompok sempalan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Dalam aksi-aksinya KOMPPAQ cenderung memiliki sikap lembut, KOMPPAQ menghormati empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu konsepsi ideologis dan wawasan kebangsaan KOMPPAQ adalah termasuk gerakan yang bersifat moderat dalam arti secara politik tidak menawarkan alternatif radikal terhadap kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung. Dalam pandangan para pengurus KOMPPAQ, berdakwah dengan baik dan berusaha menjalankan substansi Islam jauh lebih penting (*prioritas*) dan efektif dibanding upaya-upaya formalisasi Islam. Menurut KOMPPAQ, pelaksanaan *Syari'at* Islam bersifat *bottom up* (dari bawah) oleh tiap individu muslim. Bila setiap muslim sudah melaksanakan hal tersebut, maka otomatis masyarakat yang berpaham Al-Quran akan terwujud.

Dalam perspektif teori gerak sosial, sikap KOMPPAQ lebih berfokus kepada kelompoknya tanpa adanya sikap perlawanan anti pemerintah maupun tidak mengerahkan aksi-aksi pengerahan massa untuk menuntut sesuatu. Dalam aktivitasnya atau tradisi yang mereka jalankan mengikuti tradisi NU mengikuti Masyarakat sekitar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abadi, Al-Fairuz, *Al-Qamus Al-Muhit*, 1238.

Abu Ja'far Ibn Jarir al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an*, (Tt.p: Risalah, 1420 H), Juz XXIV, 142.

Abu Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma'ruf Bi al-Raghib Al-Asfahani, *Tafsir al-Raghib Al-Asfahaniy*, (Fakultas Sastra- Universitas Tanta, 1420 H) Juz I, 612.

Fahmy Zarkasyi, Hamid, *Misykat*, (Jakarta: INSIST, 2012), 133.

- Glenn E. Robinson, " Hamas sebagai Gerakan Sosial", dalam Quintan Wiktorowics (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 221-265
- Ibn Mandzur, *Lisanul Arab*. h 377.
- Jabir bin Musa Abu Bakar Al-Jazairi, *Aisar Tafasir Li Kalam al-'Aliyi al-Kabir*, (Madinatul Munawwaroh, Perpustakaan Ulum dan Hikam, 1424 H), Juz V, 125
- Jurdi, Syarifuddin, (ed. al.), *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Sosial Kemanusiaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), bab II.
- Louis bin Naquil Dzhahir Ma'luf, Munjid, (Beirut-Libanon: Dar al-Masyriq, 2005) 900.
- Majiduddin Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit*, (Beirut-Libanon, Percetakan Risalah, 1426 h), Juz I, 692.
- Muhammad bin Makram bin Ali Jamuluddin Ibn Mandzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shodir, 1414 H), Juz XV, 426-428.
- Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: Percetakan Tunis, 1984 H), 18.
- Musthafa, Ibrahim Mu'jam Wasith, (Kairo: Dar Da'wah), 588.
- Qardhawi, Yusuf, *Islam Jalan Tengah*, Terj. Alwi A.M, (Bandung: Mizan, 2017), 22.
- Quintan Wiktorowics (ed.), *Islamic Activisme: A Social Movement Theory Approach* (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2004), terjemahan *Gerakan Sosial Islam* (Yogyakarta: Daging Publishing dan Yayasan Wakaf Paramadina, 2012); Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University, 2006), terjemahan *Laskar Jihad* (Jakarta: LP3ES, 2008)
- Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, terjemahan *Gagalnya Islam Politik* (Jakarta: Serambi, 1996), hlm. 64
- Sukmana, Oman, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 4
- Syawaludin, Mohammad, *Sosiologi perlawanan, studi perlawanan Repertoar Petani di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Deepublish, CV Budi Utama, 2017), hal. 31.